

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Ketergantungan Sektor Pertanian
  - 3.2 Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian
  - 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didorong Investasi
  - 3.4 Kondisi Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai untuk Mendukung Logistik yang Efisien
  - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan
  - 3.7 Daya Dukung Lingkungan Berkurang
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2014

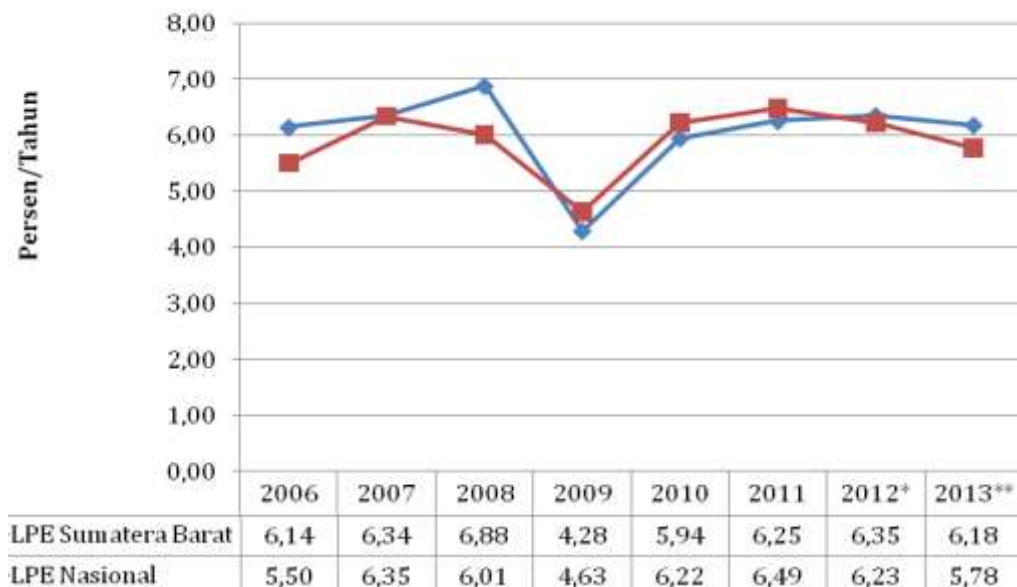
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sumatera Barat memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Perekonomian Sumatera Barat memiliki pangsa 1,64 persen terhadap total output nasional (total PDRB 33 provinsi). Beberapa komoditas unggulan di Sumatera Barat meliputi kelapa sawit, kakao, karet, dan menjadi salah satu daerah lumbung padi. Pengembangan pariwisata Sumatera Barat juga cukup potensial untuk mendukung perekonomian daerah. Kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Barat selama periode 2006 – 2013 berfluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 6,05 persen (Gambar 1). Pada tahun 2012 Sumatera Barat berkontribusi sebesar 6,88 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Sumatera.

**Gambar 1**  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

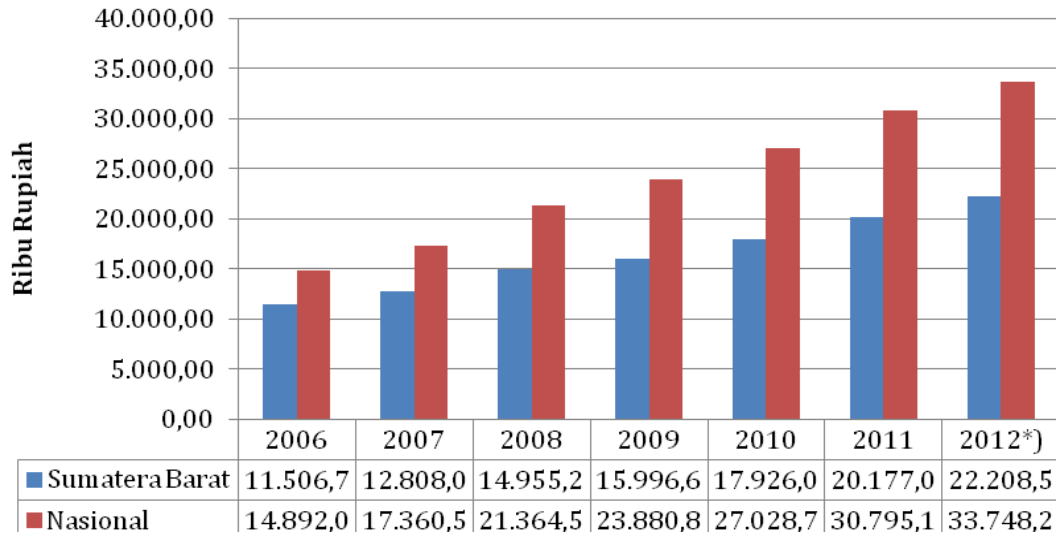


Sumber: BPS, 2013

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat. Dalam hal ini PDRB per kapita dapat dianggap sebagai perkiraan perhitungan pendapatan masyarakat daerah. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB

perkapita Sumatera Barat dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 77,27 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 65,81 persen (Gambar 2).

**Gambar 2**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**

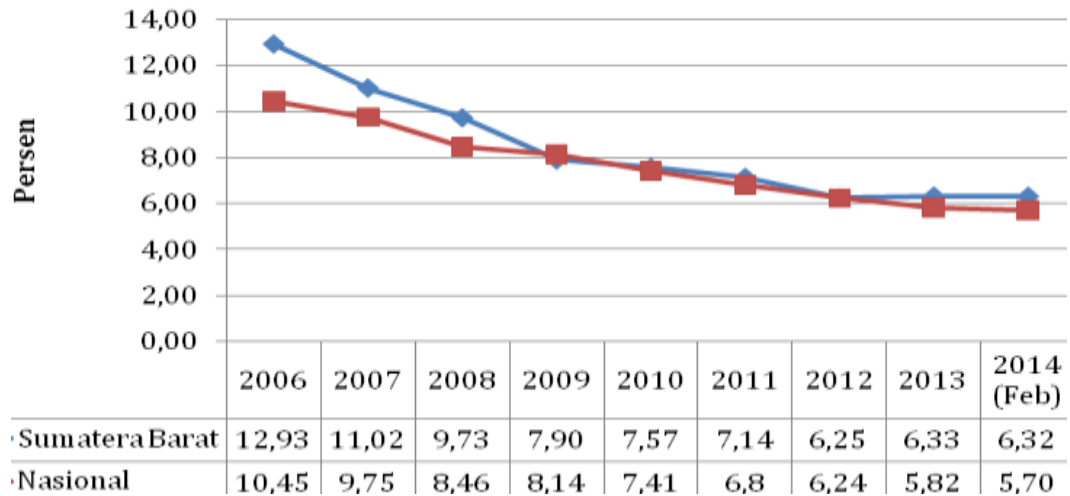


Sumber: BPS, 2012

## 2. Pengurangan Pengangguran

Indikator makro lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi telah mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat pengangguran berhasil ditekan (Gambar 3). Meski tingkat pengangguran terbuka sempat meningkat relatif tajam pada tahun 2006 sebagai dampak kenaikan harga BBM, namun perekonomian daerah mampu menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan pada tahun berikutnya. Selama periode 2006-2013 tingkat pengangguran di Sumatera Barat berkurang sebesar 6,6 persen.

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

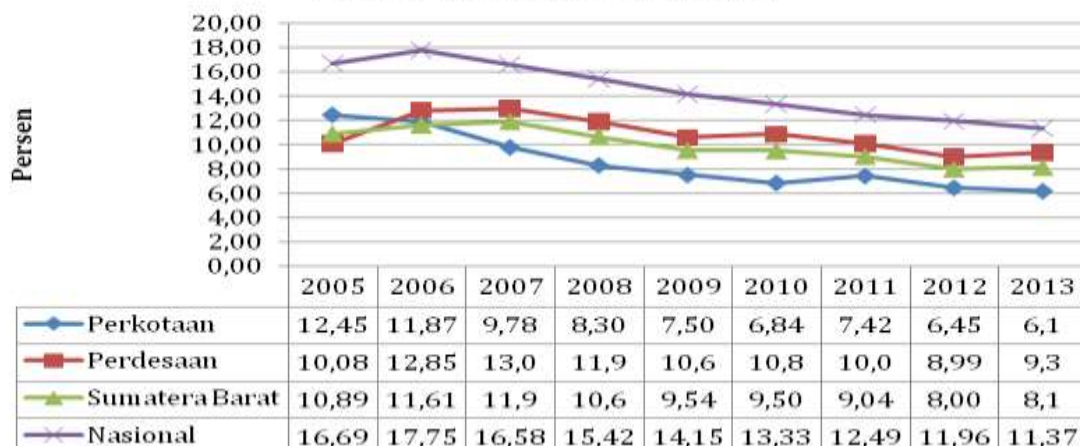


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran pada juga diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan daerah. Persentase penduduk miskin cenderung menurun selama periode 2006-2013 (Gambar 4). Pengurangan jumlah penduduk miskin di perdesaan relatif lebih lambat dibandingkan perkotaan. Penduduk di perdesaan juga terlihat lebih rentan dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2006. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan tajam persentase penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2006. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat lebih rendah dari persentase nasional. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di daerah mencapai 8,14 persen, sementara di tingkat nasional sudah mencapai 11,37 persen.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

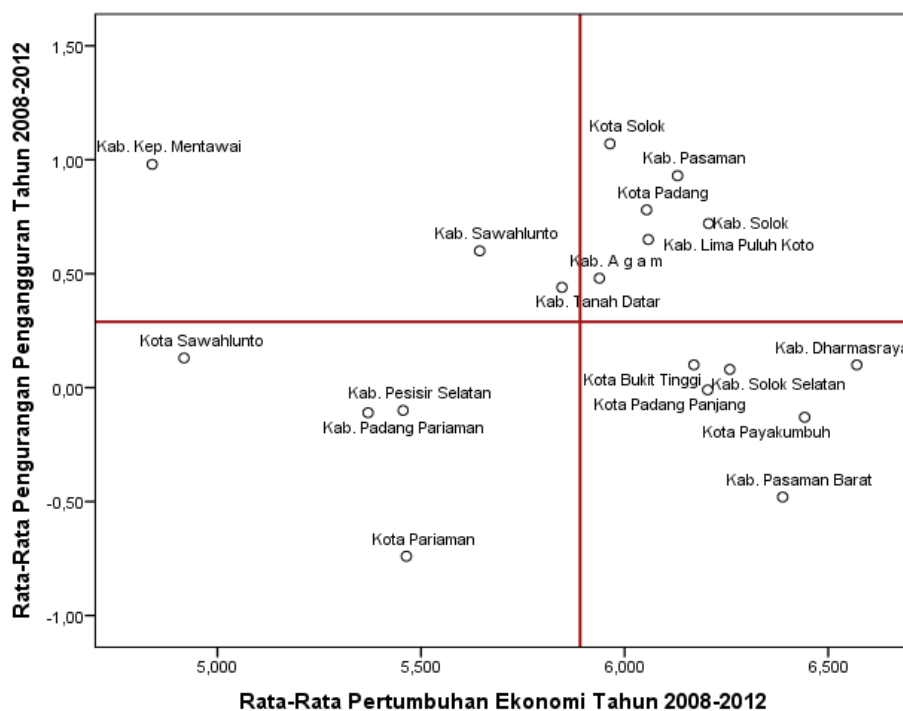
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 5). *Pertama*, Kabupaten Agam, Pasaman, Solok, Lima Puluh Koto, Kota Agam, dan Kota Padang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Kedua*, Kabupaten Sawahlunto, Tanah Datar dan Kep. Mentawai yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan**  
**Jumlah Pengangguran 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

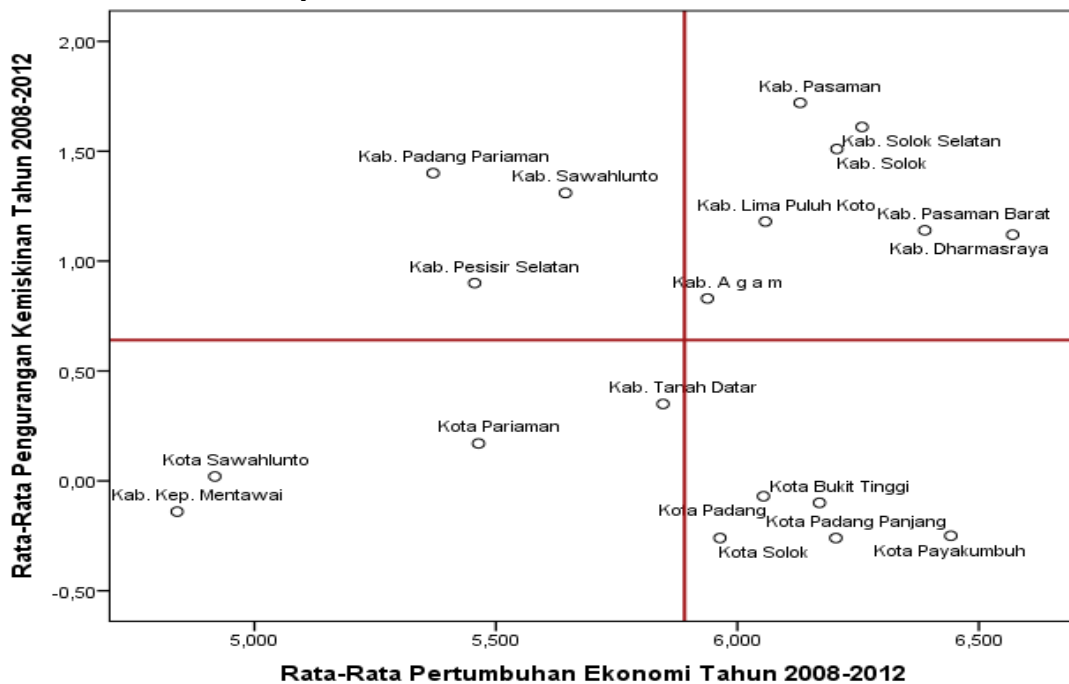
*Ketiga*, Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota sawah Lunto, dan Kota Pariaman terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

*Keempat*, Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Payakumbuh terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2005-2010 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)



*Pertama*, Kabupaten Pasaman, Solok Selatan, Solok, Lima Puluh Koto, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Agam termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

*Kedua*, Kabupaten Padang Pariaman, Sawah Lunto, dan Pesisir Selatan terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Kabupaten Tanah Datar, Kep. Mentawai, Kota Sawah Lunto, Kota Pariaman terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

### **3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM**

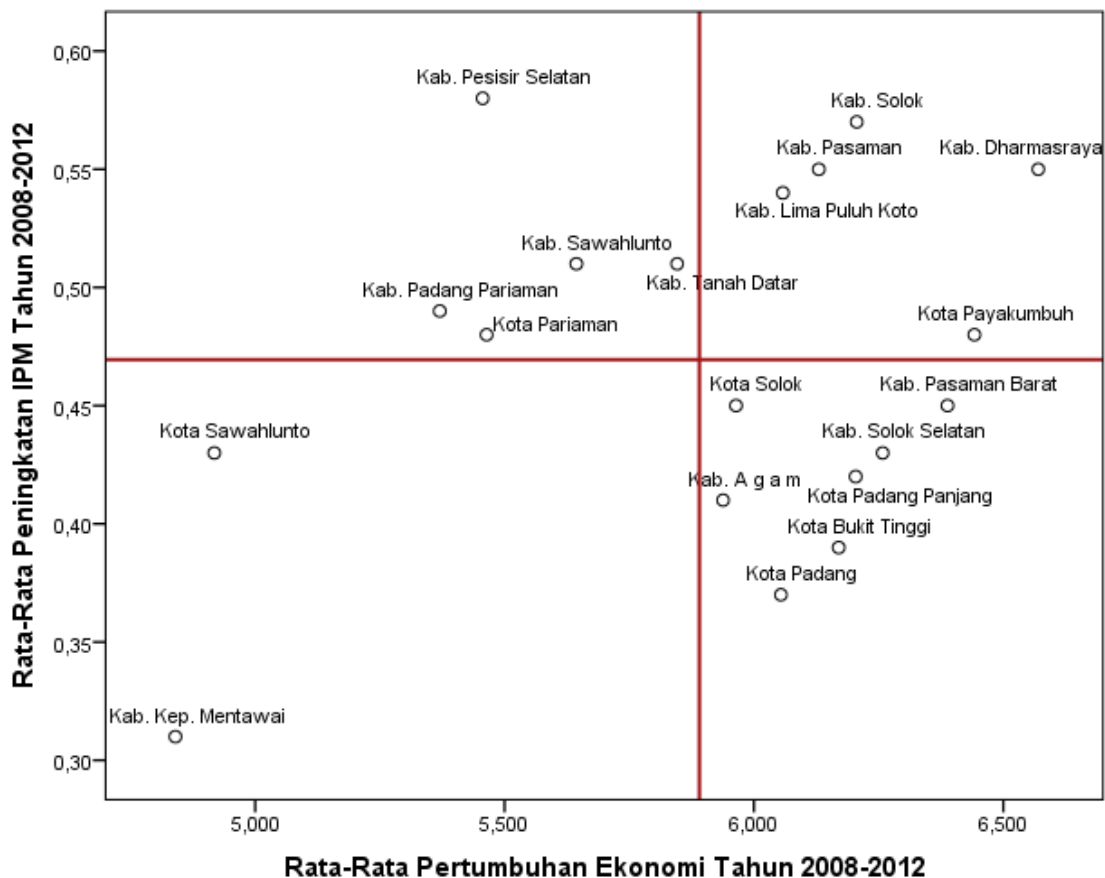
Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Dharmasraya, Solok, Pasaman, Lima Puluh Koto, dan Kota Payakumbuh masuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah,



dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kota Pariaman yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawah Lunto terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk

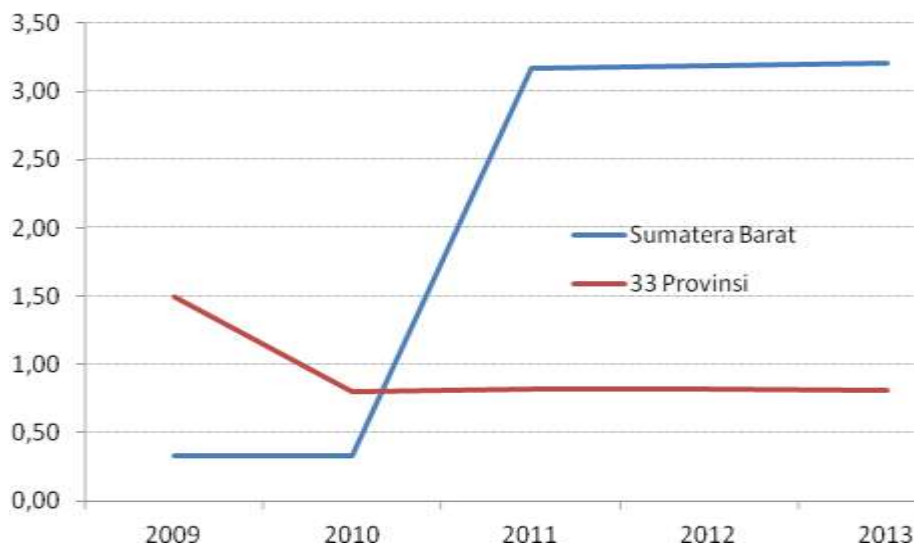
memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

*Keempat*, Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan, Agam, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Padang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2007-2012 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berada di atas nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi di Sumatera Barat disebabkan oleh perbedaan struktur perekonomian dalam masyarakat dan tidak meratanya jangkauan layanan infrastruktur.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Sumatera Barat terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Nilai PDRB Perkapita tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah di Kota Padang dan terendah adalah di Kabupaten Pesisir Selatan (Tabel 1). Tingginya pendapatan perkapita di Kota Padang dikarenakan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat didukung oleh infrastruktur yang lengkap dan memadai sehingga mendukung perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi di kota lebih besar variasinya dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Konsentrasi kegiatan ekonomi juga

terpusat di kota dibandingkan di perdesaan yang juga didukung oleh alokasi dana pembangunan yang dominan di kota. Sementara itu di kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa akibat terbatasnya fasilitas transportasi dan komunikasi di perdesaan merupakan penyebab rendahnya pendapatan perkapita.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Barat 2007-2012 (000/jiwa)**

<b>Kab/ Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kepulauan Mentawai	12.770	15.052	16.889	18.828	21.138	23.371
Pesisir Selatan	7.364	8.496	9.602	10.718	12.050	1.328
Solok	10.031	11.765	13.396	15.172	17.261	19.217
Sawahlunto Sijunjung	10.841	12.414	13.581	14.991	16.739	18.440
Tanah Datar	11.357	12.996	14.345	15.957	17.766	19.795
Padang Pariaman	11.423	13.279	14.445	15.973	17.637	19.667
Agam	10.057	11.632	12.918	15.451	16.104	18.074
Lima Puluh Koto	12.414	14.698	16.013	17.996	20.303	22.443
Pasaman	9.128	10.408	11.528	12.912	14.598	16.468
Solok Selatan	6.761	7.712	8.612	9.720	11.117	12.570
Dharmas Raya	10.188	11.671	12.597	13.937	15.839	17.363
Pasaman Barat	12.036	13.918	15.426	17.244	19.543	21.906
Kota Padang	21.767	24.864	26.556	29.383	32.662	35.930
Kota Solok	13.526	15.548	16.775	18.359	20.413	22.368
Kota Sawah Lunto	13.711	15.463	17.473	19.641	22.142	24.545
Kota Padang Panjang	13.844	15.466	17.466	19.805	2.216	24.402
Kota Bukit Tinggi	13.611	16.124	17.523	19.532	21.718	23.686
Kota Payakumbuh	11.649	13.274	14.395	16.080	18.250	20.177
Kota Pariaman	14.788	16.526	17.912	19.938	22.293	25.088
<b>Sumatera Barat</b>	<b>12.808</b>	<b>14.955</b>	<b>15.997</b>	<b>17.926</b>	<b>20.177</b>	<b>22.209</b>

Sumber: BPS, 2013

## **B. Penyebab Permasalahan Pembangunan**

### **1. Ketergantungan yang Tinggi pada Sektor Primer (Pertanian)**

Secara struktural, sektor perekonomian di Sumatera Barat masih didominasi oleh pertanian. Selama tahun 2013 sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat selain pertanian adalah perdagangan dan jasa-jasa (Tabel 2). Tingginya kontribusi sektor tersier didukung peran pariwisata dalam perekonomian daerah.

Besarnya peran sektor pertanian juga tampak pada penyerapan tenaga kerja daerah. Selama periode 2010-2014 seluruh sektor dalam perekonomian menyerap tenaga kerja secara signifikan (Tabel 3). Penyerapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Barat adalah pada sektor jasa, pertanian, serta penambangan. Penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian bisa menghambat upaya penurunan kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas. Jika luas lahan pertanian tidak bertambah, peningkatan pekerja

pertanian juga berarti menurunnya skala usaha yang bisa membuat produktivitas semakin menurun.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	22,74	22,10
2.	Pertambangan	2,68	2,79
3.	Industri Pengolahan	10,70	11,59
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,87	1,07
5.	Konstruksi	6,77	5,58
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	19,04	18,45
7.	Angkutan, Telekomunikasi	16,29	15,88
8.	Keuangan	4,48	5,15
9.	Jasa-jasa	16,44	17,38
Total PDRB		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

**Tabel 3**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	925.302	977.276	51.974
2	Pertambangan	33.478	65.961	32.483
3	Industri Pengolahan	135.445	157.035	21.590
4	Listrik, Gas, Air	6.478	6.744	266
5	Bangunan	99.232	104.050	4.818
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	452.104	460.640	8.536
7	Angkutan & Telekomunikasi	107.233	112.762	5.529
8	Keuangan	41.418	71.748	30.330
9	Jasa-Jasa	300.337	388.250	87.913
Total		<b>2.101.027</b>	<b>2.344.466</b>	<b>243.439</b>

Sumber : BPS, 2014

Sementara itu perubahan jumlah pekerja di sektor industri pengolahan tidak sebanyak perubahan di sektor pertanian dan jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan belum berlangsungnya industrialisasi dan perekonomian daerah masih bergantung pada sektor-sektor tradisional. Ketergantungan pada komoditas primer paling tidak memiliki dua risiko. Pertama, harga komoditas primer cenderung bergejolak (*volatile*) dalam beberapa tahun ini. Tidak stabilnya harga ini lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan produsen, khususnya petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Ketika harga komoditas naik, keuntungan terbesar biasanya dinikmati oleh pedagang perantara. Sementara ketika harga komoditas jatuh, beban terbesar ditanggung oleh petani. Kedua, permintaan terhadap komoditas pertanian khususnya pangan relatif inelastis, dan sebaliknya pada produk manufaktur. Perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor primer khususnya pertanian berisiko terjebak pada pertumbuhan lambat atau sedang.

Jika diamati sektor-sektor *tradable* (bisa diperdagangkan antardaerah) daerah, terdapat beberapa sektor basis yang potensial dikembangkan lebih lanjut. Semua subsektor pertanian, yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan daerah memiliki nilai *Location Quotient* lebih besar dari satu, yang mengindikasikan bahwa di sektor-sektor tersebut Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif dibandingkan daerah-daerah lain (Tabel 4). Sektor industri pengolahan bukan merupakan sektor basis daerah, namun sektor ini memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif Sumatera Barat di sektor industri pengolahan adalah pada subsektor industri tekstil dan industri semen. Terkait dengan industri tekstil, produk Sumatera Barat memiliki keunggulan di sisi keunikan dan ciri khas daerah. Karakter ini perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saingnya terhadap produk-produk tekstil masal di pasar.

**Tabel 4**  
**Nilai LQ Sektor Perekonomian Sumatera Barat 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	1,76	1,76	1,78	1,80	1,79
a. Tanaman Bahan Makanan	1,78	1,77	1,80	1,84	1,85
b. Tanaman Perkebunan	2,83	2,84	2,91	2,88	2,83
c. Peternakan	1,11	1,13	1,14	1,14	1,15
d. Kehutanan	1,68	1,69	1,73	1,76	1,83
e. Perikanan	1,22	1,23	1,20	1,18	1,16
<b>2. Pertambangan dan Penggalan</b>	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18
c. Penggalan	2,66	2,62	2,61	2,54	2,48
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,48	0,49	0,48	0,47	0,46
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,52	0,53	0,52	0,51	0,50
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	1,61	1,49	1,46	1,45	1,43
a. Listrik	2,24	2,20	2,14	2,06	2,00
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,11	1,16	1,12	1,14	1,16
<b>5. Konstruksi</b>	0,79	0,77	0,82	0,85	0,84
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	1,05	1,08	1,03	1,01	1,01
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,22	1,27	1,20	1,17	1,16
b. Hotel	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24
c. Restoran	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	1,77	1,62	1,58	1,55	1,54
a. Pengangkutan	2,90	2,89	2,94	2,97	3,03
1). Angkutan Rel	2,38	2,25	2,22	2,39	2,56

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
2). Angkutan Jalan Raya	4,38	4,43	4,63	4,74	4,79
3). Angkutan Laut	1,76	1,76	1,80	1,77	1,77
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	1,64	1,64	1,61	1,59	1,54
5). Angkutan Udara	2,26	2,16	2,03	1,98	2,08
6). Jasa Penunjang Angkutan	1,40	1,36	1,38	1,37	1,42
b. Komunikasi	0,84	0,73	0,70	0,68	0,67
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53
a. Bank	0,45	0,46	0,47	0,46	0,46
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1,57	1,50	1,50	1,48	1,47
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,67	0,67	0,67	0,65	0,64
e. Jasa Perusahaan	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>9. Jasa-jasa</b>	1,75	1,73	1,78	1,81	1,84
a. Pemerintahan Umum	2,63	2,64	2,80	2,89	3,06
b. Swasta	1,06	1,04	1,02	1,02	1,01
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,47	1,47	1,54	1,53	1,53
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	1,57	1,54	1,46	1,47	1,48
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,85	0,82	0,78	0,78	0,77

Catatan: LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

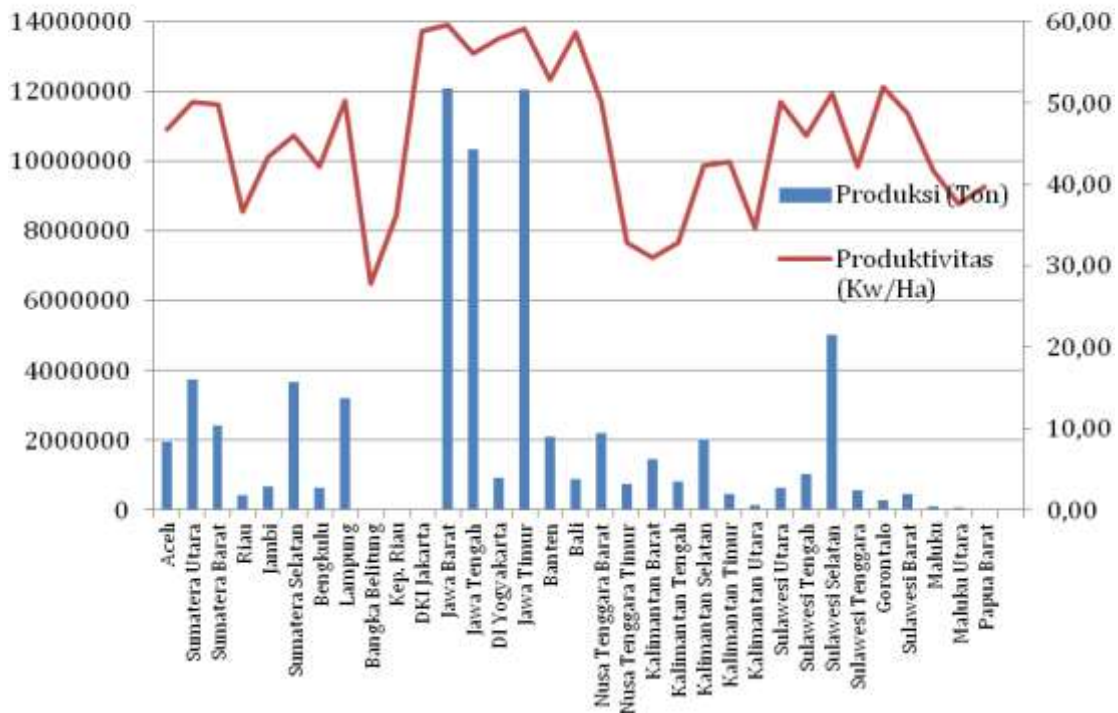
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

## 2. Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian

Salah satu peran penting Sumatera Barat bagi perekonomian wilayah dan nasional adalah sebagai lumbung padi. Meskipun volume produksi lokal hanya 3,4 persen dari total produksi nasional, namun daerah ini memiliki potensi surplus yang cukup signifikan untuk mendukung ketahanan pangan nasional (Gambar 9). Secara nasional Sumatera Barat merupakan penghasil padi terbesar ke delapan dengan produksi mencapai 2,4 juta ton padi kering giling pada tahun 2013. Dengan asumsi faktor konversi padi ke beras sebesar 62,74 persen, dan tingkat konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun, maka Sumatera Barat berpotensi memiliki surplus beras sebesar 819 ribu ton. Angka ini cukup signifikan untuk mendukung target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton beras per tahun. Tingkat produktivitas padi tahun 2013 di Sumatera barat sebesar 49,82 kw/Ha. Jika produktivitas daerah bisa ditingkatkan sama dengan tingkat produktivitas nasional, maka produksi padi Sumatera Barat berpotensi meningkat sebesar 3 persen. Bahkan bila tingkat produktivitasnya mampu menyamai Jawa Timur, maka produksi padi Sumatera Barat akan meningkat secara signifikan.

Mengingat masih besarnya peran sektor pertanian baik dalam pembentukan nilai tambah maupun penyediaan lapangan kerja, maka peningkatan produktivitas di sektor pertanian berpotensi meningkatkan kinerja pertumbuhan daerah, kesejahteraan rakyat, dan peran daerah dalam ketahanan pangan nasional

**Gambar 9**  
**Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2013**



Sumber: BPS, 2013

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didorong Investasi

Dari sisi penggunaan, perekonomian Sumatera Barat didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi (Tabel 5). Namun demikian pangsa investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) masih relatif kecil, yaitu sebesar 19,80 persen. Kondisi ini masih belum menjanjikan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Demikian halnya dengan konsumsi rumah tangga, meskipun menyelamatkan perekonomian domestik selama krisis global 2008/2009, namun tidak bisa diandalkan sebagai mesin pendorong pertumbuhan daerah dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi akan menggerus potensi tabungan masyarakat. Pertumbuhan tinggi memerlukan penambahan stok kapital untuk menunjang produksi di sektor riil. Oleh karena itu peran investasi dalam perekonomian perlu ditingkatkan.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan iklim usaha di daerah yang kondusif bagi investasi. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua



kabupaten/kota di Sumatera Barat secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

**Tabel 5**  
**Struktur PDRB Menurut Penggunaan 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	51,91	47,29
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,84	0,84
3.	Konsumsi Pemerintah	14,43	13,67
4.	PMTB	19,80	19,60
5.	Perubahan Stok	2,28	0,21
6.	Ekspor	25,40	33,23
7.	Impor	14,66	14,82
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

#### **4. Kondisi Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai untuk Mendukung Logistik yang Efisien**

Dalam konteks pengembangan wilayah Sumatera, Kota Padang merupakan salah satu pusat pertumbuhan di pesisir barat Pulau Sumatera. Konektivitas dengan provinsi lain dilayani dengan jaringan jalan lintas barat dan lintas tengah. Di samping itu Sumatera Barat juga memiliki Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Teluk Bayur (untuk antar kota dan antar pulau), dan Pelabuhan Muara (untuk kapal kecil dan sedang). Peran infrastruktur wilayah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan infrastruktur memfasilitasi pemusatan maupun penyebaran aktivitas ekonomi secara alami. Defisiensi infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas akan menghambat distribusi barang secara efisien, yang merupakan salah satu pilar utama daya saing wilayah.

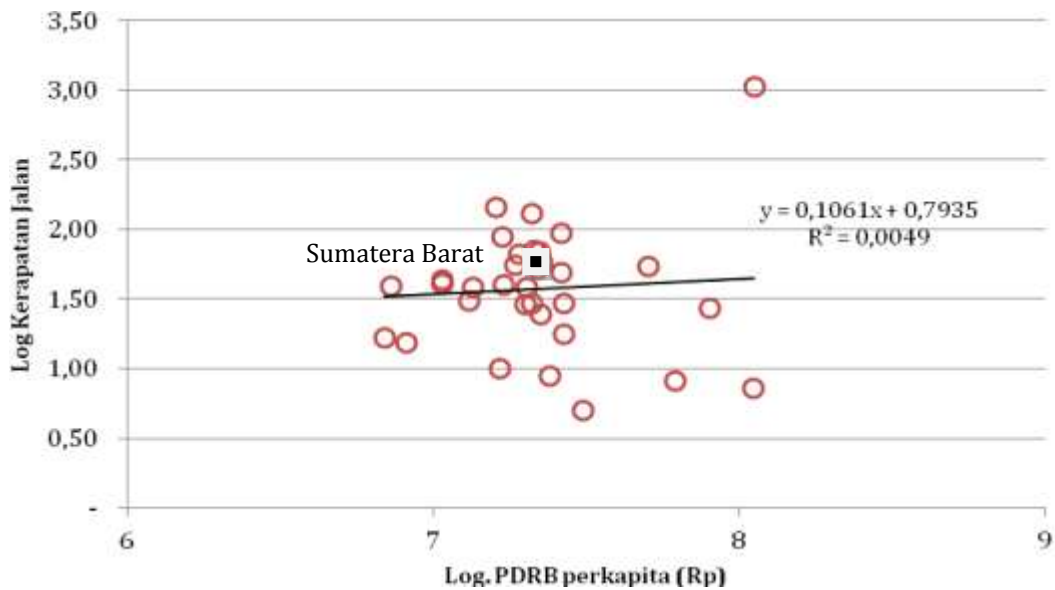
Dari sisi kuantitas, jaringan jalan di Sumatera Barat relatif cukup. Hal ini dapat dilihat dari kerapatan jalan wilayah, yaitu ukuran yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah. Kerapatan jalan di Sumatera Barat lebih tinggi dari kerapatan jalan nasional dan berada pada peringkat 12 bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (Tabel 6). Kerapatan jalan di daerah ini hampir dua kali lipat rata-rata kerapatan jalan nasional.

**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
<b>12</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>22.035</b>	<b>52,36</b>
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, terdapat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, maka kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan kerapatan jalan yang relatif tinggi seharusnya perekonomian Sumatera Barat telah berkembang lebih maju dari sekarang.

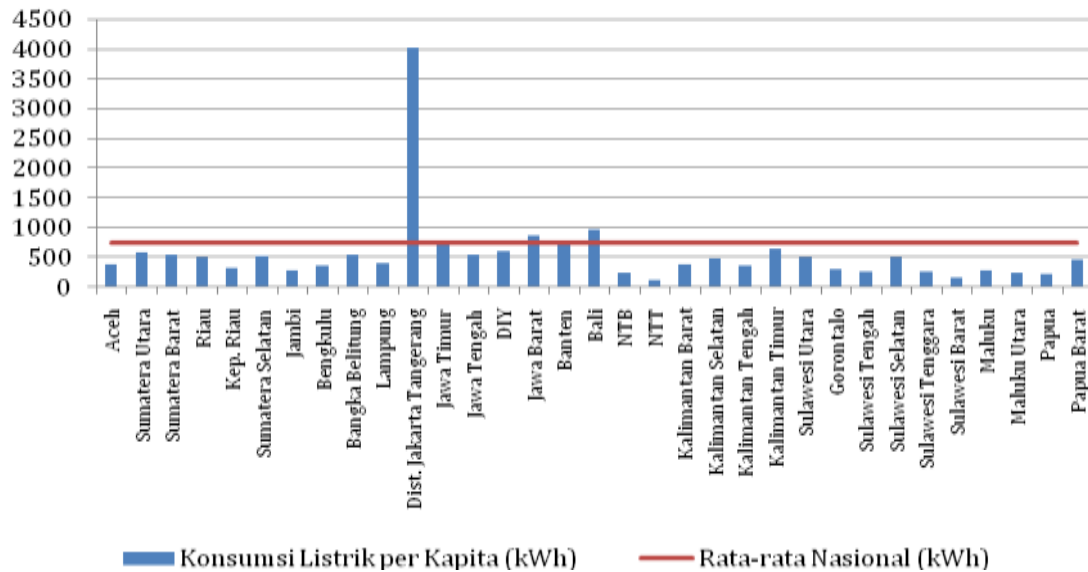
Jika dilihat dari kondisinya permukaannya, hanya 33 persen jalan wilayah yang berada dalam kondisi baik. Sisanya 20 persen dalam kondisi sedang, dan 47 persen dalam kondisi rusak (Tabel 7). Kondisi jaringan jalan semacam ini tentu mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan armada transportasi, dan meningkatkan risiko kerusakan komoditas selama pengiriman, dan sebagai akibatnya biaya distribusi menjadi tinggi.

**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan 2012**

PtrPROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sumatera Barat	9.175	50	3.204	18	5.671	31	168	1	18.218	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

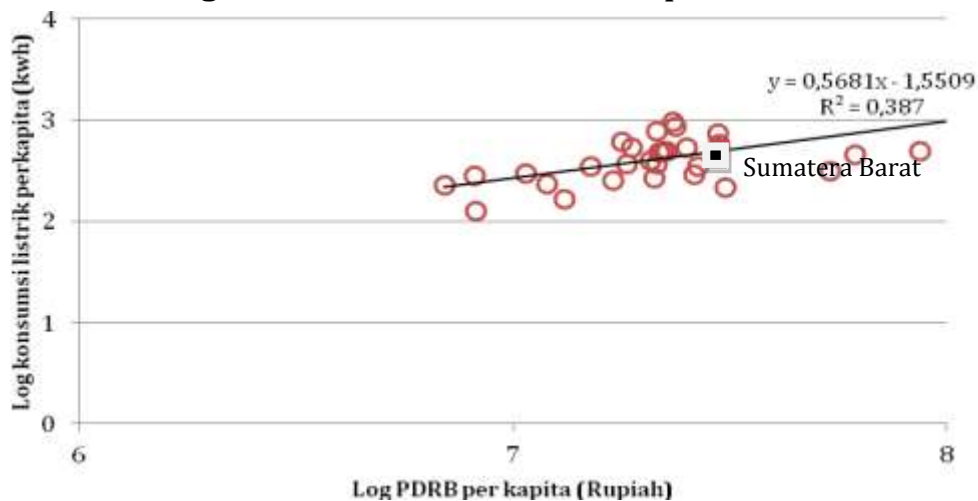
**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah listrik. Listrik memfasilitasi industrialisasi. Jika dilihat dari tingkat konsumsi listrik per kapita, kondisi di Sumatera Barat relatif rendah dan di bawah angka rata-rata nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan membandingkan 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Posisi Sumatera Barat berada di bawah kurva linier, menunjukkan provinsi ini mengalami defisiensi infrastruktur listrik pada tahun 2013.

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



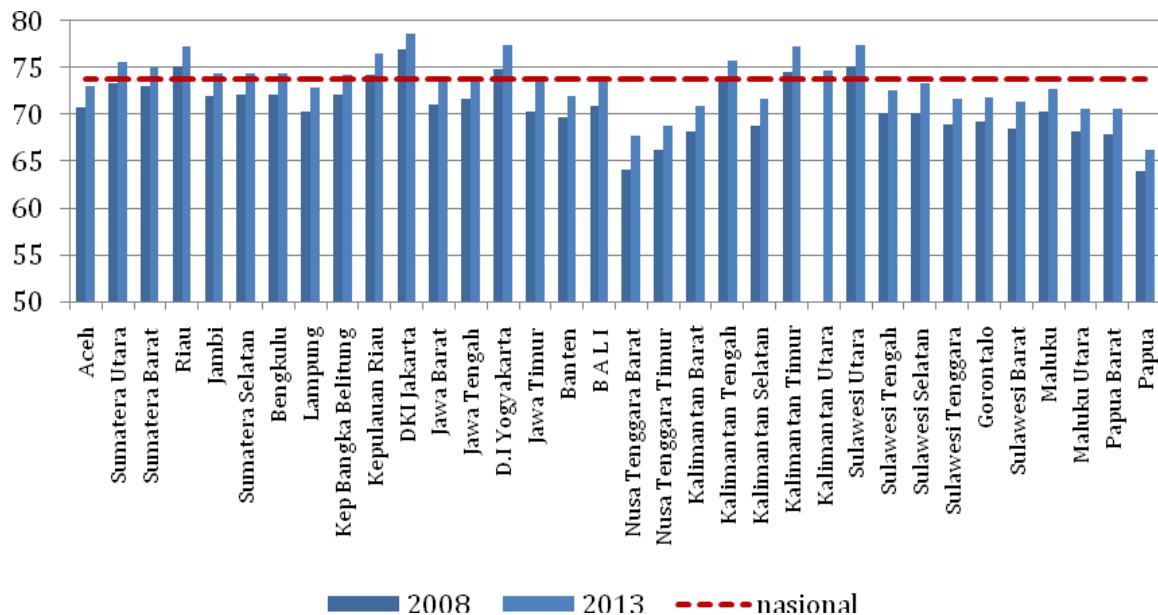
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

## 5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor kualitas sumber daya manusia tidak bisa diabaikan dalam upaya percepatan pertumbuhan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memfasilitasi inovasi dan kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi penentu keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian pembangunan sumberdaya manusia Sumatera Barat cukup baik. Angka IPM pada tahun 2013 mencapai 75,01 berada pada peringkat 9 nasional (Gambar 13). Pada indikator usia harapan hidup, terjadi sedikit perbaikan dari 69 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,1 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat meningkat dari 8,26 tahun pada 2008 menjadi 8,63 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 96,66 menjadi 97,38 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**

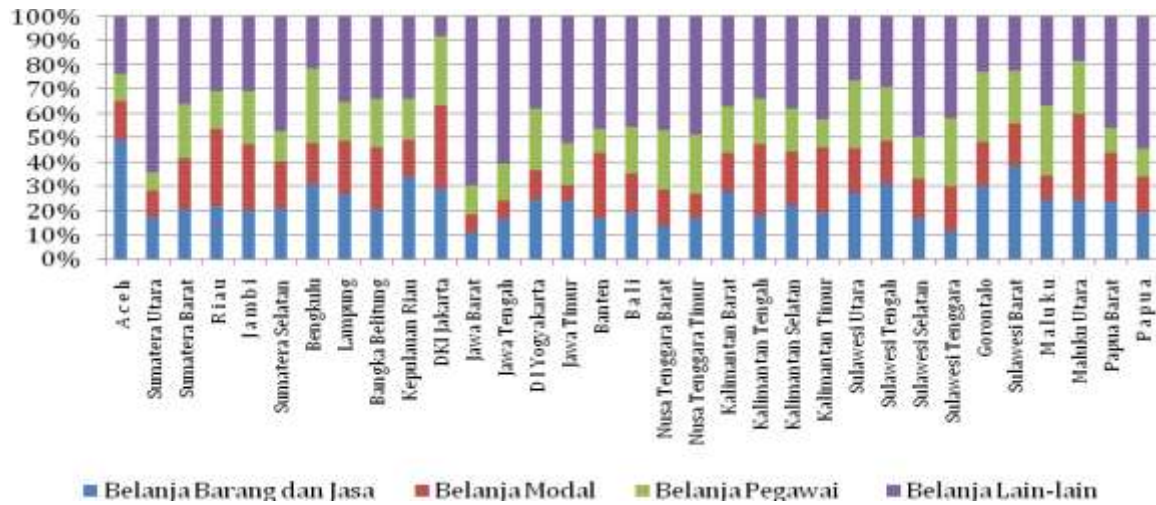


Sumber: BPS, 2013

## 6. Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan

Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah menuntut peran pemerintah dalam pembiayaan prasarana publik. Namun demikian, porsi belanja modal dalam APBD (seluruh kabupaten/kota dan provinsi) tahun 2013 ternyata relatif kecil, yakni hanya 21,14 persen dari total belanja. Sementara itu, 22,05 persen anggaran belanja dialokasikan untuk belanja pegawai (Gambar 14).

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

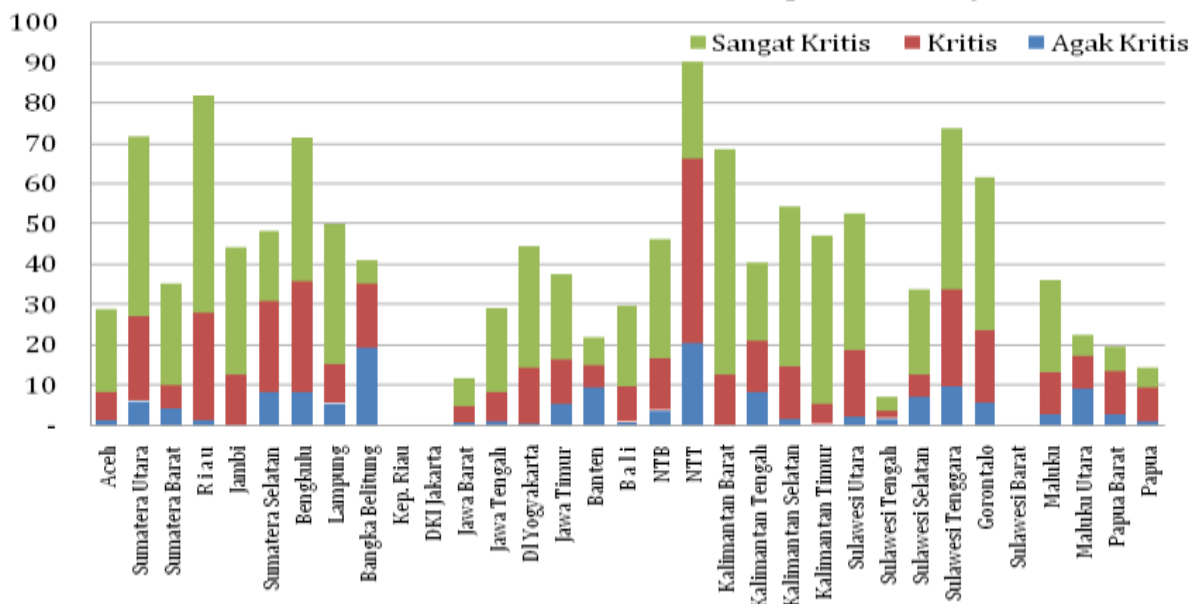
Postur APBD semacam ini kurang responsif terhadap kebutuhan riil percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Fakta ini sangat paradok bila dihubungkan dengan kondisi kerusakan jalan yang amat parah. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, sulit diharapkan terealisasinya potensi investasi di Sumatera Barat, baik yang berasal dari domestik (dalam daerah) maupun dari luar.

## 7. Daya Dukung Lingkungan Berkurang

Pertumbuhan daerah ternyata diiringi dengan memburuknya daya dukung lingkungan. Meskipun secara nasional, tingkat kerusakan lingkungan di Sumatera Barat relatif rendah dibandingkan daerah-daerah lain (Gambar 15), namun karakter wilayah menuntut upaya ekstra untuk mempertahankan daya dukung lingkungan. Sebagian besar wilayah Sumatera Barat memiliki topografi berbukit dengan rentang antara daerah tertinggi di pegunungan dengan daerah pantai relatif pendek. Di samping itu perlu diingat posisi Sumatera Barat di sepanjang lempeng tektonik sangat rawan terhadap risiko gempa bumi dan tsunami.

Rendahnya daya dukung lingkungan mengancam keberlanjutan pertumbuhan, apalagi untuk perekonomian yang masih bertumpu pada sumber daya alam dan jasa lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas yang meliputi penurunan tingkat kesuburan tanah, menurunnya keragaman hayati, meningkatnya kerentanan bencana alam, pendangkalan daerah aliran sungai, dan berkurangnya kualitas sumber daya air wilayah. Diperlukan rehabilitasi dan konservasi di sepanjang daerah aliran untuk mencegah sedimentasi berlebihan dan mengurangi risiko bencana tanah longsor dan banjir.

**Gambar 15**  
**Persentase Luas Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah**



Sumber: BPS, 2012

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2019. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan, namun peran investasi diperkirakan akan meningkat. Manfaat dari peningkatan kualitas infrastruktur wilayah ini diperkirakan juga akan dinikmati oleh daerah-daerah di luar Sumatera melalui proses keterkaitan antarindustri (*linkages*). Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,4 – 7,8 persen dapat tercapai. Kinerja investasi Sumatera Barat akan meningkat di tahun 2015 yang didorong oleh sektor swasta dan realisasi investasi pemerintah seiring dengan realisasi belanja modal yang terus meningkat. Peningkatan kinerja sektor pertanian serta perdagangan akan mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Sektor pertanian diperkirakan membaik sejalan dengan meningkatnya kinerja perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah Sumatera. Komoditas ini akan terus tumbuh seiring permintaan domestik dan dunia yang tinggi.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 6,7 – 4,8 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,14 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Sumatera Barat harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar



3,34 poin persentase atau 0,56 poin persentase per tahun. Peluang untuk mempercepat penurunan kemiskinan masih terbuka bila dilakukan pembenahan pada produktivitas sektor pertanian dan industri kecil, dua lapangan usaha di mana konsentrasi penduduk miskin berada. Di sisi lain, tantangan berat bagi penurunan kemiskinan daerah adalah dampak dari kenaikan harga BBM (pengurangan subsidi BBM) yang cepat atau lambat akan terjadi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan koordinasi horisontal dan vertikal untuk mengantisipasi kemungkinan hal ini terjadi, terutama menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk memperkecil dampak yang diterima penduduk miskin dan hampir miskin.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis**

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu tersebut adalah permasalahan yang bila ditangani akan berdampak besar pada pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan daerah. Sebaliknya bila permasalahan tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian
- b. Peningkatan iklim investasi
- c. Pembangunan infrastruktur wilayah
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- e. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah
- f. Pemulihan daya dukung lingkungan

### **2. Rekomendasi kebijakan**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyuluhan pertanian dan akses petani terhadap teknologi tepat guna.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- c. Perbaikan distribusi dan akses petani pada sarana produksi pertanian.
- d. Penyederhanaan proses perijinan usaha dengan mengurangi waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- e. Pengaspalan, pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan wilayah.
- f. Peningkatan kapasitas produksi listrik wilayah.
- g. Peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan vokasional.
- h. Revitalisasi balai latihan kerja.
- i. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah untuk infrastruktur daerah.
- j. Rehabilitasi lahan kritis
- k. Konservasi daerah aliran sungai dan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan di daerah rawan bencana.

